



Bina Desa

ISSN. 0216.4876

Rembug Rakyat Desa untuk Indonesia

SWABINA

Anak Kampus
Belajar dari Desa

Bakti Desa Bersama
Masyarakat

PEREMPUAN MAHARDIKA

Perempuan Petani
Menghadapi
Berbagai Rintangannya

BERTANI ALAMI

Meneguhkan
Kembali Definisi
Pertanian Alami



Dwi Astuti

Direktur Bina Desa

Rembug dapat dipahami dengan arti musyawarah, yaitu berunding tentang situasi dan kondisi desa kita, apa yang dimaksud dengan desa, siapa yang ada di dalam desa, dan bagaimana desa kita sekarang ini. Prinsip yang diletakkan dalam rembug rakyat desa adalah kesejajaran, kesamaan, keharmonisan karena semua mempunyai kepentingan untuk mewujudkan desa yang berdaulat.

Hal itupun diharapkan mampu menghasilkan suatu resolusi menjadi cita-cita dan harapan kita semua yaitu desa yang berdaulat. Berdaulat dapat dimaknai dengan mandiri, yaitu mandiri dalam bertindak, mandiri dalam memanfaatkan, mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di desa. Bina Desa menyebutnya Komunitas Swabina Pedesaan (KSP).

Bahwa musyawarah dijadikan sebagai media untuk bertemu dan berdiskusi antar dua pihak (baca : subjek) untuk membahas tentang masalah-masalah (realitas) yang ada di wilayah kehidupan mereka (baca : objek).

Bahkan proses musyawarah dapat menjadi media pendidikan alternatif karena dengan berdialog mengajak peserta musyawarah untuk berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Hal inilah yang mencerminkan bahwa musyawarah merupakan jalan untuk membangun harapan, solidaritas dan kekuatan. Pater Dijkstra mengistilahkan ini sebagai dialog kehidupan (*dialogue of life*).

Bagi Bina Desa, musyawarah berperan penting dalam proses demokratisasi kaum marginal. Menimbulkan rasa aman, penguahan, bebas dari perasaan tertekan, sikap lebih terbuka, berani menyampaikan pendapat, serta memahami realitas diri dan lingkungannya. Bahwa inilah langkah-langkah yang dapat dilakukan dari desa untuk bangsa.

2017 telah usai, semoga 2018 memberi harapan tergapainya asa desa berdaulat, rakyat makmur. Selamat membaca!

Penerbit

Bina Desa Press

Penanggung Jawab

Dwi Astuti (Direktur Bina Desa)

**Pemimpin Umum/
Pemimpin Redaksi**

Achmad Yakub

Redaktur Pelaksana

Gina Nurohmah

Dewan Redaksi

Mardiah Basuni

Akhmad Miftah

Affan Firmansyah

M. Chaerul Umam

Maya Saphira

John Pluto Sinulingga

Distribusi

Muhamad

Alamat Redaksi

Jl. Saleh Abud No. 18 – 19, Otto

Iskandardinata, DKI Jakarta,

Indonesia 13330

Telp: (021) 819 9749, 851 9611

Fax: (021) 850 0052

Email: redaksi@binadesa.org

website: www.binadesa.org

Redaksi menerima opini, artikel, kritik, saran dan komentar dari Komunitas Swabina Pedesaan dan pembaca, silakan kirim ke email redaksi.

Buletin ini terbit atas dukungan MISEREOR Jerman.

	DAFTAR ISI	1
---	-------------------	----------


	DARI PEMBACA	2
---	---------------------	----------

	SEKOLAH PEDESAAN	
<i>Pendidikan Koperasi dan Kewirausahaan Sosial Bagi Petani</i>		16
<i>Merawat Generasi Petani di Desa...</i>		19


	TETES PIKIRAN	
<i>Agenda Pemerintah untuk Reforma Agraria Belum Mengakomodir Kepentingan Perempuan</i>		26

	SOSOK	
<i>Jaro Ruhandi, Membuka Isolasi Desa dengan Literasi</i>		36

	FOKUS	
<i>Rembug Rakyat Desa Untuk Indonesia...</i>		3
<i>Rembug Rakyat Desa di Kawasan Rawa Lebak</i>		6
<i>Muyswarah Bangun.. Bersinergi...</i>		8
		10


	PEREMPUAN MAHARDIKA	
<i>Perempuan Petani Menghadapi Berbagai Rintang</i>		20

	GLOBAL	
<i>Perubahan Transformatif untuk Kedaulatan Pangan</i>		28
<i>Keadilan Gender Harus Jadi Bagian dari Transformasi Pedesaan</i>		30

	PUSTAKA	
<i>Petani-Nelayan Ujung Tombak Kedaulatan Pangan</i>		38

	SWABINA	
<i>Anak Kampus Belajar Dari Desa</i>		11
<i>Mahasiswa UIN Belajar NLK di Bogor</i>		13
<i>Bakti Desa Bersama...</i>		14

	REFORMA AGRARIA	
<i>Masyarakat Desak Pemerintah....</i>		22
<i>Koalisi Nelayan Teluk Jakarta Gugat...</i>		24
<i>Ditertibkan Tanah Telantar....</i>		25

	BERTANI ALAMI	
<i>Meneguhkan Kembali Definisi Pertanian Alami</i>		32
<i>Bertani Alami, Petani Berdaulat</i>		34

	BUDAYA	
<i>Seren taun Bentuk Syukur dan Pengharapan</i>		39
KIAT PRAKTIS		
<i>Membuat Tepung Sukun</i>		40

Assalamualaikum, Bapak dan Ibu Bina Desa. Perkenalkan saya ibu Narita, saya ingin memiliki wadah untuk membina petani di lahan kering Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) tapi saya bingung harus bekerjasama dengan siapa.

Narita Amni Rosadi

Redaksi: Waalaikumussalam wr wb, terima kasih Ibu Narita telah menghubungi Bina Desa. Sebagai informasi awal saat ini Bina Desa bekerja di Aceh Barat hingga Sulawesi, untuk sementara ibu dapat berkomunikasi dengan Bina Desa via media Bina Desa. Kami ada website, buletin, buku, media sosial dan semuanya tempat belajar bersama.

Kelompok tani kami berada di Kelurahan Lubuk Raya Kota Tebingtinggi Sumatera Utara, apakah ada pendampingan untuk kelompok petani padi sawah di daerah perkotaan? Terima kasih.

Purba Novarisma Eva

Redaksi: Terima kasih telah berkomunikasi

dengan Bina Desa. Kami ada mitra di Tebingtinggi dengan kegiatan pertanian alami di Serdang Bedagai. Contact personnya Lorent Aritonang. Terima kasih.

Kiprah nyata bina desa patut diacungi jempol.

Dasuki Raswadi

Redaksi: Terima kasih untuk apresiasinya, mari kita bergerak bersama!

Bangun membangun dan bersatu untuk mewujudkan petani sehat dan sukses. Petani Alami maju terus, ayo semangat!

Si Roy

Redaksi: Tetap semangat untuk kita semua, Bertani Alami Petani Berdaulat!



Buletin Bina Desa diterbitkan oleh Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Lembaga Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) di bidang pemberdayaan sumber daya manusia pedesaan.

Buletin Bina Desa mengumpulkan dan mengolah pengalaman dari para pendamping, anggota, kelompok, dan masyarakat umum. Kemudian membagikannya kepada siapa saja yang ingin mengembangkan organisasi dan memberdayakan masyarakat, menuju terbentuknya komunitas swabina pedesaan.

Bina Desa juga menerima donasi untuk mendukung gerakan pengembangan sumber daya manusia di berbagai desa. Donasi dapat dikirimkan ke rekening:

Yayasan Bina Desa Sadajiwa
Bank Mandiri Cab. Jatinegara Barat
006.00.05010107

Rembug Rakyat Desa Untuk Indonesia yang Berkeadilan Sosial

Oleh Gina Nurohmah

Pemerintah Desa Warungbanten dan Bina Desa mengadakan Rembug Rakyat Desa yang diselenggarakan selama enam hari (25-30/09/2017) bertempat di Balai Adat Kaolotan Cibadak. Rembug Rakyat Desa merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Tani Nasional 2017. Adapun rangkaianannya yaitu kegiatan seren taun, rembug rakyat desa, refleksi nasional dan pendidikan pertanian alami.

Peserta rembug rakyat desa yang hadir berasal dari 12 provinsi (Aceh, Sumatera

Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah) duduk sama rata untuk berembug. Adapun temanya adalah "Desa yang Berdaulat untuk Indonesia yang Berkeadilan Sosial".

Pembukaan kegiatan turut dihadiri oleh Pembina, Tim koordinator Bina Desa, Koordinator Umum Bina Desa yang sekaligus Kepala Sekolah Pedesaan (SEPEDA), Mardiah

Para peserta dari 12 provinsi duduk sama rata untuk berembug di Banten September 2017.
(Foto : Bina Desa)





Basuni, Wikanta dari Kaolotan Cibadak berkesempatan memberikan pidato pembukaan, serta Kepala Desa Warungbanten dan masyarakat Cibadak.

Pada pembukaannya, Mardiah menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus menyambut hari kemenangan tani di Indonesia, yaitu Hari Tani Nasional.

Terdapat dua point penting yaitu rembug desa dan kedaulatan desa. Rembug dapat dipahami dengan arti musyawarah, yaitu

berunding tentang situasi dan kondisi desa kita, apa yang dimaksud dengan desa, siapa yang ada di dalam desa, dan bagaimana desa kita sekarang ini. Berdaulat dapat dimaknai juga dengan kemerdekaan berpikir dan berekspresi.

“Sudah saatnya para petani, nelayan, buruh tani, buruh nelayan mengekspresikan pengetahuan dan ilmunya. Prinsip yang diletakkan dalam rembug rakyat desa adalah kesejajaran, kesamaan, keharmonisan karena semua mempunyai kepentingan untuk



Warga desa, pemerintah desa dan Pemkab OKI, Sumsel dalam rembug rakyat desa. (Foto: Gina)

mewujudkan desa yang berdaulat” imbuh Kepala SEPEDA.

Tokoh Kaolotan Cibadak, yaitu Wikanta yang juga tokoh SABAKI mengucapkan selamat datang untuk para peserta rembug rakyat desa dan juga selamat menikmati suguhan budaya dalam rangkaian acara seren taun. “Kami dari kasepuhan mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kemajuan” imbuhnya.

Rembug rakyat desa yang diwarnai

keberagaman pesertanya baik dari suku, profesi, dan usia ini diharapkan mampu menghasilkan suatu resolusi yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua yaitu desa yang berdaulat.

Berdaulat dapat dimaknai dengan mandiri, yaitu mandiri dalam bertindak, mandiri dalam memanfaatkan, mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di desa. Bina Desa menyebutnya Komunitas Swabina Pedesaan (KSP). #

Rembug Rakyat Desa di Kawasan Rawa Lebak

Rembug Rakyat Desa akan menjadi sebuah media yang digunakan dalam berbagai kegiatan, menurut Koordinator Umum Bina Desa, Mardiah Basuni. Rembug menjadi point penting, yaitu dapat diartikan musyawarah. Bahwa Kita berunding dengan situasi dan kondisi desa kita, apa yang dimaksud dengan desa, siapa yang ada di dalam desa, dan bagaimana desa kita sekarang ini, pungkasnya di pembukaan rembug rakyat desa di warungbanten, Banten September silam.

Kini, dengan bertema “Realisasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Nelayan serta Pembangunan Desa” Rembug Rakyat Desa Region Sumatera diselenggarakan di Desa Bangsal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terselenggara atas kerjasama Bina Desa dengan Pemerintah Desa Bangsal, dan INAGRI. Rembug yang dimulai dengan semiloka (seminar dan lokakarya) pada pertengahan oktober lalu dihadiri oleh M. Hasan (Kepala Desa Bangsal),

Achmad Yakub (Koordinator Bina Desa), JJ Polong (Dosen Fakultas Pertanian UNSRI), dimoderatori oleh Syahroni (Direktur INAGRI) dan dibukanya kegiatan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ir.Syarifudin SP.

Syarifudin memberikan penjelasan bahwa Kabupaten OKI merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Selatan dan rata-rata masyarakatnya mengkonsumsi nasi hasil panen petani itu sendiri. Kepala Dinas KPTPH menjelaskan bahwa adanya program pemerintah untuk asuransi lahan pertanian, adanya pupuk bersubsidi yang murah, dan program bantuan pemerintah yang membantu petani membuat kepala dinas KPTPH ini menyatakan bahwa program pemerintah Kabupaten OKI meningkatkan kesejahteraan rakyat desa.

Namun, hal tersebut direspon oleh JJ Polong, akademisi dari UNSRI. Menurutnya dengan



Pembicara semiloka dari kiri : Syarifudin, M. Hasan, Syahroni, Achmad Yakub, dan JJ Polong (Foto : Bina Desa)



Leuit merupakan produk budaya artifak yang masih terjaga di Desa Warung Banten (Foto : Bina Desa)

bantuan yang melimpah jangan sampai disalahgunakan oleh petani dengan suatu tujuan dan pemberdayaan pun menjadi sorotannya. Beliau mengingatkan pada peserta yang hadir bahwa suatu program jangan membuat ketergantungan pada petani sehingga menjadikan suatu masalah baru. Menurutnya dulu pertanian kita dikenal dengan bertani dengan seni dan sekarang sudah hilang karena diganti dengan nama agribisnis yang berbisnis dalam sektor pertanian.

Inisiatif Desa Membangun

M Hasan selaku Kepala Desa Bangsal melihat sektor pertanian dengan adanya UU Desa dan UU Perlindatayan adalah suatu hal yang memberikan peluang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat desa, baginya peranan desa kedepan adalah keamanan sektor desa yang bisa melindungi kawasan desa yang bisa dinikmati masyarakat Desa Bangsal.

Ini terkait juga dengan cita-cita Desa Bangsal yaitu salah satunya menjadi desa wisata yang berbasis agroekologi dan kerbau rawa lebak.

Hal ini berhubungan dengan potensi Desa Bangsal yaitu rawa lebak, kerbau rawa, padi rawa, dan lainnya. Sehingga menjadi penting untuk kebutuhan tata ruang desa agar dapat mengatur letak sektor-sektor yang dapat tertata dengan baik.

Dalam seminar tersebut dibungkus oleh Koordinator Bina Desa, Achmad Yakub. Menurutnya desa agroekologis wisata yang akan digarap oleh Desa Bangsal haruslah dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat desa saja. Dengan adanya UU Desa memberikan peluang yang lebih besar untuk desa mampu mengurus desanya sendiri. Demikian juga mengenai kebijakan pertanian alami bisa didorong peraturan desa (perdes) melalui musyawarah desa agar holistik.

Kegiatan seminar tersebut dilanjutkan dengan lokakarya yang juga dihadiri oleh petani dari region sumatera dan aceh, turut berpartisipasi pula masyarakat Desa Bangsal dan santri dan santriwati ponpes Ibnul Fallaah. **(bd031)**

Musyawarah Membangun Harapan, Solidaritas dan Kekuatan

Oleh John Pluto Sinulingga

Desa Warungbanten merupakan salah satu dari dua desa (Desa Warungbanten dan Desa Hegarmanah) yang masuk dalam wilayah Kaolotan Cibadak. Wilayah ini terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di dalam desa ada dua struktur yaitu pemerintahan desa dan Lembaga Adat Kaolotan Cibadak. Pemerintahan desa lebih banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sipil sedangkan lembaga adat berperan dalam ranah adat.

Wikanta mengatakan bahwa "Pemerintahan desa dengan Lembaga Adat Kaolotan Cibadak selalu berjalan beriringan dan saling

mendukung dalam rangka membangun Desa Warungbanten. Kita selalu duduk bersama dalam membicarakan perencanaan dan persoalan dalam wilayah ini." Saat redaksi Bina Desa mengunjungi rumahnya pada 28 September 2017.

Jaro Ruhandi yang dalam dua tahun ini menjadi Kepala Desa Warungbanten menuturkan bahwa antara Kaolotan Cibadak dan Desa Warungbanten selalu mengadakan musyawarah dalam perencanaan pembangunan di desa. Apabila perencanaan itu berkaitan dengan adat, maka Kaolotan Cibadak akan mengundang pemerintahan desa untuk terlibat dan demikian juga sebaliknya.



Wikanta Juru Bahasa Kaolotan Cibadak berbaju putih duduk berdampingan dengan Jaro Desa Warung Banten berbaju biru saat musyawarah berlangsung (Foto: Bina Desa)

Salah satu perencanaan yang dicontohkan oleh Jaro Ruhandi adalah pembangunan rumah adat Kaolotan Cibadak yang saat ini dalam tahap penyelesaian. Rumah adat merupakan aset Kaolotan yang pembangunannya dipercayakan kepada pemerintahan desa. Untuk biaya pembangunan diambil dari dana desa dan dari anak cucu yang berasal dari Kaolotan Cibadak. Apabila pemerintahan desa telah selesai membangun rumah adat tersebut maka akan diserahkan dan dikelola Kaolotan Cibadak.

Apa yang diutarakan oleh Jaro Ruhandi itu ditegaskan kembali oleh Wikanta, salah seorang yang dituakan di Kaolotan Cibadak bahwa "Pertemuan antara pemerintah desa dan Kaolotan Cibadak dalam musyawarah, biasanya mendiskusikan terkait masalah-masalah dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak". Apabila membicarakan tentang adat maka kaolotan akan mengundang pemerintahan desa untuk bermusyawarah atau sebaliknya. Wikanta

yang juga seorang guru ini menegaskan bahwa "Setiap kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan desa, kasepuhan akan selalu mendukung".

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa musyawarah (sunda : badamian) dijadikan sebagai media untuk bertemu dan berdiskusi antar dua pihak (baca : subject) untuk membahas tentang masalah-masalah (realitas) yang ada di wilayah kehidupan mereka (baca : object). Bahkan proses musyawarah dapat menjadi media pendidikan alternatif karena dengan berdialog mengajak peserta musyawarah untuk berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Hal inilah yang mencerminkan bahwa musyawarah merupakan jalan untuk membangun harapan, solidaritas dan kekuatan. Pater Dijkstra mengistilahkan ini sebagai dialog kehidupan (*dialogue of life*).#



Bersinergi untuk Desa yang Berdaulat

Akhir September lalu telah dilaksanakan Rembug Rakyat Desa di Desa Warungbanten, salah satu rangkaian kegiatannya ialah dialog kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi politik, dan budaya tani. Sebagai moderator yaitu Koordinator Umum Bina Desa, Mardiah Basuni dan narasumbernya yaitu Sri Palupi, anggota Dewan Pembina Bina Desa, Suwanto Adi, Soetrisno, dan Ketua Dewan Pembina Bina Desa Francis Wahono.

Sri Palupi sebagai peneliti Institute Ecosoc menjelaskan tentang permakultur sebagai jalan kedaulatan pangan, permakultur didesain dengan meniru keadaan di alam dengan tujuan untuk keselarasan alam. Terdapat tiga etika permakultur dan dua belas prinsip dalam permakultur.

Menurut Wahono, Ketua Dewan Pembina Bina Desa menegaskan bahwa permakultur bukan bahan baru diluar pertanian alami, tetapi sebagai pelengkap dalam mendesain. "Saya rasa disini permakultur tidak bisa digunakan di level rumah tangga tapi di level komunitas dan desa".

Lebih lanjut Francis Wahono mengajak peserta diskusi untuk memahami budaya sekitar, mengutip pernyataan Kuntjoroningrat bahwa terdapat tiga bentuk budaya, yaitu artifact, ide-ide, dan hubungan ide antara alam dan manusia yang terjadi. Tujuan dari permakultur dan lainnya adalah karena kita ingin berdialog, ketika kita memanusiakan lingkungan, pasti lingkungan akan memanusiakan kita. Selanjutnya dijelaskan bentuk-bentuk produk budaya, misalnya pisang menjadi pisang goreng itu merupakan produk utuh kebudayaan, leuit (lumbung : baca) itu kuno dan itu merupakan produk budaya artifak yang masih ada di Desa Warungbanten.

"Budaya merupakan hasil ingatan yang

diceritakan kepada anak-anak, padi tanpa ilmu akan hilang, ilmu tanpa padi tidak ada bukti" tegasnya.

Suwanto Adi, anggota Pembina Bina Desa menjelaskan terkait mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat, pertama memaparkan terkait perbandingan desa dulu dengan desa sekarang. Desa dulu, secara sistematis dimiskinkan oleh negara, seluruh mentalitas dan spritualitas dipinggirkan, setiap konsep dari desa dianggap kuno. Tetapi, desa sekarang dianggap memiliki kesempatan dengan membangun yang produktif, menumbuhkan prakarsa lokal, ada jaminan dari UU Desa untuk terus maju dan berubah. Disitulah perlu adanya institusi ekonomi untuk menjaga yang dibangun terus berkembang, yaitu diciptakannya lembaga ekonomi yang bertanggung jawab, salah satunya BUMDES. Menurutnya, masalah utama adalah politik pertanian di Indonesia. lebih mempertimbangkan pasar daripada rakyat.

Sebagai penutup Soetrino menegaskan bahwa diskusi ini ada sebagian yang sangat konseptual, tapi juga ada sebagian yang menyentuh kebutuhan desa saat ini. Misalnya apa yang disebutkan mas wardo pilihan antara koperasi dan bumdes, keduanya harus saling bersinergi dan lepas dari kepentingan pribadi. Kompromi antara dua badan ini harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum.

"Saya setuju dengan peserta dari gunungkidul yang mengatakan bahwa rembug semacam ini jangan hanya dilakukan sekali, saat ini saja dan hasilnya hanya untuk kita saja, Bina Desa harus bisa mengkoordinasikan kegiatan berikutnya dan hasilnya bisa digunakan untuk mendorong hal-hal lain di luar". **(bd031)**



Salah satu bentuk proses mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dalam berintegrasi dengan masyarakat Desa Ciasihan dan Desa Ciasmara (Foto : Amalia Nur Fitri/ Mahasiswa)

Anak Kampus Belajar dari Desa

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia mencapai 257,89 juta jiwa dan sekitar satu dari empat penduduk Indonesia adalah pemuda. Pemuda selalu mempunyai peran penting dalam sejarah perjalanan Indonesia. Dari lahirnya organisasi pemuda Boedi Oetomo tahun 1908, hingga bersatunya pemuda meruntuhkan rezim orde baru pada tahun 1998 dan kini tahun 2017 Indonesia memiliki 62,06 juta pemuda yang akan terus berkembang dengan perjuangannya, walaupun tanpa bambu runcing.

Data statistik tahun 2016 menunjukkan bahwa perkotaan masih menjadi magnet bagi pemuda, hanya sekitar 26,68 juta pemuda yang berada di pedesaan. Ini lebih rendah dibandingkan pemuda yang berada di perkotaan mencapai 33,39 juta.

Ketidaktertarikan pemuda terhadap desa, dilandasi dengan berbagai hal. Dari hal paling klasik ekonomi, fasilitas yang tidak mencukupi hingga terkukung pada paradigma perkotaan adalah kesuksesan. Padahal desa di tahun-

tahun terakhir ini mempunyai panggung tersendiri, salah satunya dengan lahir UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan peluang besar agar desa dapat secara mandiri mengurus desanya sendiri.

Melihat kondisi pemuda yang semakin beralih ke perkotaan, Bina Desa bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk berinteraksi di desa. Hal ini sebagai sarana belajar mahasiswa kesejahteraan sosial dalam berintegrasi dengan masyarakat desa untuk meneliti desanya sendiri. Untuk itu mahasiswa berada di Desa Ciasihan dan Ciasmara, Kecamatan Pamijahan selama 43 hari. Selama itu, 39 mahasiswa kesejahteraan sosial berproses untuk belajar dan praktik NLK (Nalantik Lembur Kuring) bersama masyarakat.

Terdapat tahapan untuk mahasiswa dapat berproses dengan masyarakat pedesaan, tahapan pertama adalah proses integrasi antara mahasiswa dengan masyarakat desa untuk memunculkan saling percaya dan terbukanya ruang dialog yang setara. Tahap kedua melakukan penggalian data dan informasi seputar desa dan masyarakatnya. Tahap ketiga mahasiswa menyusun atau memilah data-data serta informasi yang diperoleh dari masyarakat menjadi lebih teratur dan detail. Tahapan ke-empat mahasiswa memfasilitasi masyarakat untuk memetakan/identifikasi masalah, klasifikasi masalah, analisa sebab-akibat, merumuskan prioritas masalah, hingga memetakan potensi desa dan merencanakan kegiatan.

Dialog yang dibangun mahasiswa bersama masyarakat desa dilandaskan pada dialog yang setara, karena dari situlah timbul rasa percaya masyarakat untuk merasa nyaman mengeluarkan pendapat dalam diskusi-diskusi kecil dan membahas sangat mendalam. Menurut salah satu mahasiswa di Desa Ciasmara “Setelah kami hampir dua minggu di desa ini, masyarakat sudah mulai menyapa dan bercerita tentang kehidupannya. Bahkan satu pertanyaan yang kami ajukan, jawabannya dapat satu lembar halaman folio”.

Salah satu staf Bina Desa, John Pluto Sinulingga yang sempat hadir dalam memfasilitasi kegiatan tersebut menyampaikan bahwa ini merupakan kerja-kerja fasilitator perubahan, kehadirannya di masyarakat untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat terhadap realitas dan sekaligus juga mampu untuk menyusun rencana aksi bersama masyarakat desa. “Semoga dari puluhan ada yang tertarik untuk meniti jalan sepi ini” pungkasnya.

Proses selama 43 hari di desa, setidaknya memberikan gambaran nyata pada mahasiswa kesejahteraan sosial UIN Syarif Hidayatullah tentang kondisi desa saat ini, mendapatkan prespektif yang berbeda tentang memandang desa dan salah satu harapannya adalah kembalinya para mahasiswa ke desanya masing-masing, menjadi pemuda desa yang berpartisipasi di desa. Mahasiswa sebagai pemuda juga merupakan harapan bangsa, ditangan merekalah wajah Indonesia 30 tahun ke depan. **(bd030/bd031)**



Mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN melakukan dialog yang setara bersama masyarakat di Desa Ciasihan dan Ciasmara (Foto : John Pluto Sinulingga/Bina Desa)



Umbul ponggok (Foto: Njogyadotcom)

BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Ratusan Warganya Ikut Memiliki

Keberhasilan Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyedot perhatian banyak kalangan terutama desa. Bagaimana tidak, Desa Ponggok yang dulu dikenal sebagai desa miskin, justru telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan omzet mencapai Rp12 Miliar.

Kreativitas aparat desa di Kecamatan Polanharjo itu mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan wisata Umbul Ponggok dari Rp 5 juta per tahun menjadi Rp 6,5 miliar per tahun.

Obyek wisata bernama Umbul Ponggok itu kian terkenal setelah foto-fotonya tersebar ke media sosial. Desa Ponggok pun terpilih sebagai desa wisata terbaik di Indonesia untuk kategori pemberdayaan masyarakat.

Kini badan usaha milik desa (BUMDes) Tirta Mandiri tersebut mampu memperoleh pendapatan Rp 6,5 miliar per tahun dengan keuntungan bersih mencapai Rp 3 miliar dari tempat tersebut. Keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan usaha BUMDes yang lain.

“Ponggok dulu masih tertinggal, potensinya belum tergali. Dulu tahun 2007 ketika kami awal menjadi Kepala Desa kami bingung, Ponggok ini banyak air, tapi kami bingung mau mengolahnya seperti apa,” ujar Kepala Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono.

BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok memiliki 13 unit usaha yang dikelola secara profesional. Tahun 2015 BUMDes tersebut mampu meraih omzet Rp6,2 Miliar, Tahun 2016 Rp10,3 Miliar, dan Tahun 2017 hingga Oktober lalu mencapai Rp12 Miliar.

"Pengelolaan kami sudah dalam bentuk holding dan dikelola secara profesional. Potensi sekecil apapun kalau dikelola secara optimal akan menghasilkan hal yang luar biasa," ujarnya.

Dari sekitar 700 keluarga di Desa Ponggok, 430 di antaranya menjadi pemilik dalam usaha pengelolaan obyek wisata Umbul Ponggok. Nilai investasinya sekitar Rp 5 juta per keluarga. Adapun bagi hasil yang diperoleh berkisar 7-15 persen per bulan. Dari hasil penjualan tiket dan penyewaan peranti selam air dangkal (snorkeling).

Dengan berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri, setiap satu keluarga bisa menerima bagi hasil sekitar Rp 400-500 ribu per bulan. Dengan pendapatan pasif (pasif income) yang diperoleh dari bagi hasil tersebut, warga Desa Ponggok memiliki tabungan untuk

biaya pendidikan anaknya.

Selain warga, sejumlah lembaga di Desa Ponggok juga turut berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri. Tiap RW berinvestasi masing-masing Rp 50 juta, PKK Rp 100 juta, PAUD/TK juga berinvestasi Rp 25 juta. Dari investasi ini, PAUD/TK di Desa Ponggok setiap bulan punya kas Rp 2,5 juta untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Para ibu rumah tangga yang semula pengangguran kini turut diberdayakan dengan usaha olahan perikanan. Desa Ponggok juga membuat program satu rumah satu sarjana. Yang mana dalam hal ini, satu anak dari setiap rumah akan dibiayai kuliahnya oleh desa. Sementara dari sisi kesehatan, jika ada warga yang sakit sudah tidak lagi mikir biaya. Pemerintah desa sudah mengcover semua. (BD051TR)

Bakti Desa Bersama Masyarakat

Oleh: Yulianti*

Kesejahteraan Sosial merupakan sebuah jurusan yang berfokus pada pembangunan dan kesadaran pola pikir individu dan komunitas serta advokasi terhadap kebijakan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan sosial individu atau masyarakat. Menjadi seorang pekerja sosial profesional tidak mudah ada tahapan yang harus dilewati oleh mahasiswa. Adapun tahapan menjadi seorang pekerja sosial profesional mahasiswa harus melakukan praktikum 1 dan 2. Praktik 1 mahasiswa kesejahteraan sosial berfokus pada individu dan dilaksanakan di lembaga-lembaga sosial. di praktikum 1 mahasiswa harus memiliki klien 1 untuk diintervensi. Berbeda dengan praktikum 1, praktikum 2 hadir untuk mengajak dan mendidik mahasiswa hidup berdampingan bersama masyarakat dengan tujuan bisa meningkatkan kesadaran dan mengubah pola pikir masyarakat dengan

potensi yang dimiliki untuk hidup yang lebih sejahtera.

Mahasiswa kesejahteraan sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Bina Desa melaksanakan praktikum 2 di Kecamatan Pamijahan tepatnya di Desa Ciasihan dan Ciasmara dalam waktu 43 hari dengan rentang waktu dari 16 Oktober-28 November 2017. Dengan waktu tersebut mahasiswa diharapkan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dimasyarakat dalam melakukan integrasi dan penggalian informasi. Mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok, 2 kelompok di desa Ciasmara dan 3 kelompok di desa Ciasihan. Dalam waktu 43 hari tersebut, 3 hari digunakan mahasiswa dan Bina Desa untuk melaksanakan kegiatan pembekalan. Pembekalan dilaksanakan pada 17-19 Oktober 2017.

17 Oktober 2017 hari pertama pembekalan, pada hari ini mahasiswa berkenalan dengan staf Bina Desa dan kader Bina Desa di Ciasihan dan Ciasmara. Staf Bina Desa sekaligus fasilitator diwakili oleh Ibu Mardiyah, Pak Miftah dan Teh Yani. Sedangkan dari Kader Bina Desa diwakili oleh Ibu Anit dan Pak Nahri. Setelah itu, ada penjelasan mengenai alur bakti desa yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dan menjelaskan tentang Bina Desa kepada mahasiswa. Dalam pertemuan pertama bisa disimpulkan bahwa Bina Desa dan mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat kemiripan dalam tujuan menjalankan bakti desa di masyarakat.

18 Oktober 2017 hari kedua pembekalan, pada pertemuan kedua diisi dengan materi cara berintegrasi dengan masyarakat dan PRA (Participatory Rural Appraisal). Dalam integrasi dengan masyarakat mahasiswa dituntut untuk melepaskan atribut mahasiswa, melebur dengan masyarakat, saling menghargai, membangun kepercayaan dan empati. Selain integrasi, hal yang terpenting dalam melaksanakan bakti desa yaitu mahasiswa harus melaksanakan PRA. PRA adalah suatu proses pengkajian desa secara partisipatif dengan masyarakat. PRA hadir bertujuan untuk perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Dalam melaksanakan PRA mahasiswa harus bisa menggunakan 8 alat yang ada dalam PRA agar bisa menemukan permasalahan dan

potensi untuk dipertajam analisisnya. Adapun 8 alat yang harus dilaksanakan yaitu, Sejarah Desa, Peta Desa, Transek, Kalender Musim, Aktivitas Keseharian Petani, Diagram Venn, Bagan Kecenderungan dan Perubahan, dan Bagan Alur Produksi. Setelah mendapatkan pembekalan materi mahasiswa dibagi menjadi 8 kelompok untuk melaksanakan PRA dengan 8 alat masing-masing kelompok menggunakan 1 alat.

19 oktober 2017 hari ketiga pembekalan, pada pertemuan ketiga pembekalan berisi tentang review materi sebelumnya dan presentasi hasil PRA dari masing-masing kelompok. Setelah melaksanakan PRA setiap kelompok praktikum membuat rencana kegiatan seminggu ke depan setelah melaksanakan kegiatan pembekalan. Di akhir sesi pertemuan perwakilan mengungkapkan evaluasi, kesan dan pesan terhadap kegiatan pembekalan bersama Bina Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembekalan yang diberikan oleh Bina Desa kepada mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat membantu mahasiswa mengingat dan mempertajam materi untuk melaksanakan pendampingan di masyarakat. Kini, mahasiswa sedang berproses di Desa Ciasihan dan Desa Ciasmara untuk belajar bersama masyarakat dalam menggali masalah dan potensi desanya.

**Penulis adalah salah satu mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang sedang berpraktik di Desa Ciasihan dan Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Bogor.*



Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dengan Bina Desa saat acara pembekalan di TC Desa Ciasihan, Pamijahan, Bogor (Foto: Mahasiswa UIN)



Pendidikan Koperasi dan Kewirausahaan Sosial Bagi Petani dan Nelayan

Sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum tani dan nelayan seringkali menjadikan kaum tani dan nelayan menjadi kelompok pinggiran. Padahal kaum tani dan nelayan adalah faktor produksi utama yang memproduksi bahan pangan bagi kebutuhan konsumen. Namun di Indonesia petani dibuat ketergantungan dengan asupan dari luar mulai dari bibit, pupuk pestisida hingga harga jual komoditas hasil pertanian yang tidak dapat dikontrol oleh petani.

Demikianpun dengan nelayan yang seringkali karena keterbatasan modal harus masuk dalam sistem 'ljon' yang membuat nelayan semakin tidak berdaya dan semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan.

Salah satu hal yang dapat dijadikan penguatan untuk kaum tani dan nelayan adalah bentuk penguatan ekonomi bagi kaum tani dan nelayan melalui jalan usaha bersama dalam bentuk koperasi dan juga dalam bentuk kewirausahaan sosial.

Hal tersebut yang melandasi Swara Nusa Institute dan Bina Desa melaksanakan pendidikan koperasi dan kewirausahaan sosial bagi petani dan nelayan di Sekretariat Lumbung Tani Kulon Progo Desa Tangjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, DIY akhir November 2017 silam.

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kapasitas, dan prinsip-prinsip pengelolaan terkait koperasi dan kewirausahaan sosial ini dihadiri oleh 24 orang yang terdiri dari 13 organisasi.

Organisasi tersebut antara lain KSU Ngudi Makmur (Karanganyar), IKADA (Jepara), Koperasi AWK (Arta Wiguna Karya, Jepara), Puspita Bahari (PPNI Demak), SPU, Makmur Jaya Lestari (Rembang), PPNI Gresik, Ngudi Mulyo (Gunung Kidul), Paguyuban Sido Makmur (Lumajang), Paguyuban Sidojoyo (Kudus), Lumbung Tani (Kulon Progo), KTM (Kulon Progo), dan Kelompok Perempuan Nelayan Al-Hikmah (Jepara).

Kepala Desa Tangjungharjo yang turut

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa memiliki klinik tanaman dan mempunyai kebijakan pertanian di desa yaitu teknis bertani sistem legowo, tanah kas desa disewakan kepada petani dengan model lelang tertutup, serta memberlakukan penyemprotan alami.

Kadespun menyampaikan terkait sudah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang baru berjalan yaitu simpan pinjam dan akan adanya pasar ikan desa.

Terdapat tiga hal utama yang didiskusikan secara bersama dalam kegiatan tersebut, yaitu pengembangan dan penguatan organisasi, membangun ekonomi dan kewirausahaan sosial, serta konsep dan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi.

Hal tersebut selaras dengan tiga permasalahan hasil diskusi para peserta, bahwa 13 organisasi yang turut berpartisipasi memiliki permasalahan organisasi terkait internal organisasi yang belum solid, jaringan eksternal yang belum terkelola dengan baik, dan manajemen organisasi yang belum tertata.

“Koperasi mempunyai 3 pilar, yaitu pendidikan, keswadayaan, dan solidaritas.”

Aris Hartono dalam pendidikan di Kulon Progo silam menegaskan bahwa koperasi mempunyai 3 pilar, yaitu pendidikan, keswadayaan dan solidaritas.

“Apabila pendirian koperasi tanpa 3 pilar tersebut maka pastilah akan ambruk,” tegas Ketua Dewan Pengurus CU.

Koperasi perlu diyakini sebagai soko guru kekuatan ekonomi rakyat harus dibangkitkan untuk memperkuat gerakan tani dan nelayan dalam konteks mewujudkan kedaulatan rakyat. **(bd031)**



Proses belajar santri/santriwati Ibnul Fallaah dalam kegiatan pertanian
(Foto: Rohman)

Merawat Generasi Petani di Desa Bangsal

Pondok Pesantren Ibnu Fallaah atau sekedar disebut Ibnu Fallaah terletak di Desa Bangsal, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mengambil nama dari Bahasa arab, Ibnu Fallaah memiliki arti anak petani atau dapat diistilahkan menjadi generasi petani.

Dilatarbelakangi oleh keadaan geografis Desa Bangsal yang terisolir, yaitu cukup jauh dengan akses kecamatan maupun kabupaten dan hanya memiliki satu akses transportasi melalui laut, beberapa aktivis gerakan tani menginisiasi sebuah lembaga pendidikan. Dengan tujuan agar semua anak yang lulus sekolah dasar dapat meneruskan sekolahnya dan tidak lagi ada alasan geografis untuk bersekolah.

Selain persoalan geografis, persoalan tentang pola pikir pertanian pun menjadi persoalan yang pelik. Siswa yang merupakan anak dari seorang petanipun malas untuk bertani. Saat ditanyakan pada seluruh santrinya, siapakah yang bercita-cita menjadi petani? Hasilnya tak satupun santri dan santriwati yang bercita-cita menjadi petani. Penuturan Rohman salah satu pendidik dan bagian pengurus Ibnu Fallaah.

Ibnu Fallaah memilih pendekatan yang berbasis agama, sebagai jalan untuk

mendekati minat masyarakat di pedesaan karena ketika berbicara di desa topik agama selalu menjadi daya tarik sendiri. Hal itupun menjadi misi yang ditetapkan oleh Ibnu Fallaah yaitu Mandiri, Religius, dan Ekologis. Biasanya disebut sebagai tiga pilar Ibnu Fallaah yang diterapkan pula dalam proses belajar.

Pada tahun ajaran 2016/2017 pertanian alami mulai menjadi bidang studi di sekolah. Langkah ini untuk mempengaruhi dan merubah pola pikir siswanya terkait petani, pertanian yang suram. Ibnu Fallaah terbuka dengan berbagai jaringan, salah satunya dengan fakultas pertanian Universitas Sriwijaya untuk memberikan kuliah umum yang berkaitan dengan wirausaha pertanian dan pengetahuan serupa yang dapat merangsang keterkaitan siswanya ke dalam dunia pertanian, "Minimal merubah pola pikir bahwa pekerjaan pertanian adalah mulia" tegas Rohman.

Harapannya dengan adanya Ibnu Fallaah yang berpegang pada tiga pilar, yaitu Mandiri, Religius, dan Ekologis serta dengan kemampuan yang ada kita berikan terhadap santri-santriwati, "Kita yakin bahwa anak petani bisa!" pungkas Rohman dengan penuh semangat. **(bd031)**





Perempuan Petani Menghadapi Berbagai Rintangan

Oleh : Leong Yee Ting*

Banyak anak Indonesia yang tumbuh dewasa dengan mendengarkan pepatah “surga ada di bawah telapak khaki ibu”.

Namun, perempuan petani Indonesia terus mengalami rintangan dalam banyak hal. Sekitar 40% petani skala kecil adalah perempuan, yaitu sebesar 7,4 juta pada tahun 2013. Perempuan berperan pada hampir semua tahap produksi namun mereka kekurangan akses terhadap layanan tanah, kredit, dan penyuluhan.

Pada tahun 2003, hanya sepertiga tanah bersertifikat di Jawa yang dimiliki oleh perempuan. Meskipun Undang-Undang Pernikahan 1974 mengatur tentang kepemilikan istri, hal ini jarang dipraktikkan dalam pembuatan sertifikat karena rendahnya tingkat pendidikan dan juga tingginya pola pikir patriarki untuk menempatkan nama pria di sertifikat.

Akses lahan yang tidak setara berarti juga akses kredit yang tidak setara, karena sertifikat tanah digunakan untuk agunan kredit. Hal ini memiliki dampak nyata pada kehidupan perempuan petani dan keluarga mereka. Di Cianjur, Jawa Barat perempuan

petani dan keluarganya memiliki banyak hutang kepada tengkulak karena terbatasnya akses kredit. Utang diambil bukan hanya untuk input pertanian, tetapi juga untuk kebutuhan dasar atau perawatan kesehatan darurat. Banyak dari perempuan ini terpaksa menjadi pekerja migran di Taiwan atau Arab Saudi untuk membayar hutangnya.

Penyuluh pertanian lapangan cenderung mengabaikan perempuan petani. Terdapat asumsi bahwa pekerjaan pertanian yang dilakukan oleh perempuan dipandang sebagai pekerjaan sampingan dari pekerjaan rumah tangga mereka atau hanya sebatas membantu laki-laki di bidang pertanian. Padahal faktanya adalah perempuan ini sangat miskin sehingga mereka tidak punya pilihan selain bekerja di pertanian, namun tidak mendapat pengakuan dari pihak berwenang.

Perempuan secara nyata kurang memiliki akses terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan, meski mempunyai peran penting. Organisasi pertanian sering didominasi oleh laki-laki. Kelompok petani campuran dengan anggota perempuan dan pria aktif jarang terjadi. Meskipun ada

beberapa organisasi pertanian perempuan di Yogyakarta dan Sumatra Selatan, namun cenderung ditinggalkan dalam pengambilan keputusan di masyarakat.

Perempuan petani juga diharapkan menanggung beban ganda pekerjaan rumah tangga dan pertanian. Terkadang, mereka tidak dibayar atau dibayar lebih rendah daripada pria. Ini memberikan dampak fisik dan psikologis yang signifikan terhadap mereka.

Masalah ini semakin mendesak karena kecenderungan yang ada terus memperburuk situasi yang dialami perempuan petani. Migrasi laki-laki dari desa ke kota telah menyebabkan "feminisasi" pertanian, yang berarti bahwa dengan ketidakhadiran laki-laki, pekerjaan pertanian sekarang dilakukan oleh perempuan.

Namun, para perempuan ini tidak memiliki hak istimewa seperti laki-laki untuk mengakses sumber daya dan kepemimpinan. Hal ini dapat merusak produktivitas pertanian. Juga, perubahan iklim dan akibatnya yang tidak dapat diprediksi, cuaca ekstrem memberi tekanan yang besar pada perempuan. Sebagai petani, mereka harus menyesuaikan jadwal bertani dengan cuaca; sebagai ibu dan istri, mereka harus memastikan kesejahteraan keluarga dalam keadaan yang sulit.

Pemberdayaan perempuan petani dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi semua pemangku kepentingan. Jika perempuan memiliki akses lebih besar, produktivitas pertanian dan rumah tangga mereka akan meningkat yang akan berdampak pada peningkatan dan kestabilan pendapatan keluarga.

Telah terbukti bahwa peningkatan pendapatan dan aset perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga lebih signifikan daripada peningkatan pendapatan pria. Hal ini juga akan meningkatkan martabat perempuan petani di masyarakat. Keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam organisasi pertanian akan

membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan lebih tepat, dan meningkatkan produksi dan profitabilitas organisasi.

Pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa perempuan petani memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang kepemimpinan. Langkah-langkah konkrit terhadap hal ini mencakup peningkatan pendidikan anak perempuan, dorongan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam organisasi pertanian. Upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Selain itu, perempuan petani harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang metode adaptasi, dan teknologi prakiraan iklim.

Namun, Indonesia adalah negara yang sangat beragam; daerah yang berbeda memiliki norma budaya yang berbeda pula. Perempuan petani Jawa menempati posisi yang ambigu; mereka sering tidak tercermin sebagai pemilik lahan secara formal di atas dokumen, namun secara informal, budaya Jawa bekerja sangat melindungi mereka. Bahasa Jawa memiliki istilah untuk barang kepemilikan selama pernikahan, yaitu *gono-gini*, dan konsep ini lebih berpengaruh dalam membentuk perilaku keluarga daripada peraturan resmi atau bahkan gagasan Islam.

Selanjutnya, praktik tradisional arisan – sebuah asosiasi tabungan berputar skala kecil – berfungsi sebagai sumber kredit informal bagi perempuan petani Jawa. Budaya Bali dan Minangkabau selalu memberikan peran yang kuat bagi perempuan di mana perempuan memiliki hak atas tanah dan secara aktif dapat mengelola sendiri tanah mereka.

Sebaliknya, perempuan petani yang paling rentan mungkin tinggal di wilayah timur. Di Sulawesi, perempuan sering menderita akibat kegagalan panen karena mereka harus mencari tambahan penghasilan.

Demikian juga, di Timor Tengah Selatan, perempuan mengalami kekurangan gizi selama musim kering karena biasanya

mereka yang terakhir makan di keluarga. Dalam budaya Papua, perempuan selalu memiliki status dan pendidikan rendah meski memiliki beban kerja yang ekstrim. Sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan perbedaan latar belakang budaya perempuan petani dari berbagai daerah, untuk memahami situasi dan kebutuhan unik mereka.

Masalah perempuan petani “tak terlihat” ini biasa terjadi di Asia Tenggara, namun perempuan petani di Indonesia relatif lebih dirugikan daripada rekan mereka di Thailand dan Filipina, karena masyarakat di negara-negara tersebut adalah masyarakat matrilineal.

Jika kita benar-benar menghormati ibu kita sebagai pemberi nafkah, sebagai jalan menuju surga dan kehidupan yang lebih baik, pertama kita perlu membuka jalan sebesar-besarnya untuk mereka. Sebagai pondasi dunia kita, mereka layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik.#

**Penulis adalah warga negara Singapura yang saat ini sedang bekerja magang di ASEAN Farmers' Organization Support Program di ASEAN Foundation di Jakarta. Beliau merupakan mahasiswa tingkat akhir Jurusan Sejarah di University of Oxford. Penulis ingin berterimakasih pada Mardiah Basuni (Yayasan Bina Desa) dan Stephanie Heng untuk bimbingan dan dukungannya.*

***artikel ini telah terbit tanggal 07 Oktober 2017 di www.thejakartapost.com dengan judul Female farmers face multi-layered struggle*

****Terjemahan bebas oleh Gina Nurohmah dan Affan Firmansyah*

Masyarakat Desak Pemerintah Indonesia Segera Mencabut Komitmen Terhadap WTO

Kelompok masyarakat sipil (IGJ, Bina Desa, dan SPI) mendesak pemerintah untuk segera mencabut komitmennya terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini merujuk pada kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya.

“Tentunya kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia. Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani”, pungkas Rachmi, Direktur Eksekutif IGJ.

Dijelaskannya, Pada 9 November 2017 yang lalu, Appellate Body WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1994, khususnya terkait dengan Pasal 11 ayat (1) GATT mengenai General Elimination on quantitative restriction.

Dalam hal ini Panel Appellate Body WTO meminta Indonesia untuk bertindak konsisten dengan GATT 1994. Putusan Panel Appellate Body WTO ini memperkuat putusan Panel WTO sebelumnya yang diputuskan pada 22 Desember 2016.

Rachmi menyatakan sesuai aturan WTO, Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam jangka waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, Indonesia

harus memberikan kompensasi kepada Selandia Baru dan AS yang besarnya disepakati bersama.

“Jika masih tidak dicapai kesepakatan mengenai bentuk atau besaran kompensasi maka Selandia Baru dan AS dapat meminta kepada DSB WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia,” paparnya.

Petani Kian Terpuruk

Petani di Indonesia sudah berada di garis kemiskinan, salah satu indikatornya ialah Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah. Penjelasan Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuad “Bila masih menjadi anggota WTO, petani berpeluang akan semakin miskin, karena dipastikan hasil pertanian dalam negeri dibanjiri produk impor terkhusus dari New Zealand dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara pengaju gugatan ke WTO”.

Penolakan jelas mengganggu kedaulatan bangsa yang terrefleksi dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan sebagai niat baik pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. “Sudah waktunya Indonesia berani keluar dari WTO, terlebih setelah gugatan

banding Indonesia ditolak”, lanjut Zainal.


Achmad Yakub, dari Bina Desa memaparkan bahwa secara peraturan perundangan nasional tentang Pangan. Pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota mempunyai kewajiban memenuhi ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Artinya tak mungkin menyerahkan kepentingan pangan sebagai keamanan nasional ke mekanisme perjanjian WTO yang dikenal sangat pro pasar, merugikan petani dan ekonomi kita secara mendasar.

Kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketa tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Bahkan sistem perjanjian perdagangan bebas semakin memperkuat monopoli importir dan negara industri.

“Untuk itu, IGJ, Bina Desa, dan SPI mendesak agar pemerintah Indonesia untuk segera mencabut komitmen yang merugikan serta tidak mengikat komitmen baru di WTO.” Pungkasnya pada senin 20 November 2017. (bd031)



Foto: Reuters



Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan nelayan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta Utara (21/11/2017).

KSTJ & Nelayan Teluk Jakarta Gugat HGB Pulau D

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dan 15 Nelayan menggugat surat nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 yang diterbitkan oleh Kepala BPN Jakarta Utara tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Kapuk Naga Indah atas Tanah Pulau D Seluas 312 Hektar. KSTJ dan nelayan mendaftarkan gugatan mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada kemarin, 21 November 2017.

Tigor Hutapea, aktivis KIARA yang juga juru bicara koalisi menyampaikan bahwa melakukan pengaduan karena dalam penerbitan HGB Pulau D ini terdapat beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah SK HGB terbit pada hari yang sama dengan hari pengajuan dengan ditandatangani kepala BPN Jakarta Utara, Kasten Situmorang. "Permohonan HGB diajukan PT Kapuk Naga Indah pada tanggal 23 Agustus 2017 dan hari itu juga tanggal 23 Agustus 2017 secara langsung diterbitkan SK pemberian HGB. Ini dibuat secara kilat dan akal-akalan" imbuh Tigor.

Koalisi menuding bahwa penerbitan HGB Pulau D oleh BPN Jakarta Utara juga melanggar karena diberikan saat moratorium reklamasi berlangsung. Kementerian Lingkungan Hidup masih menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di pantai utara

Jakarta. "Dan memang seharusnya pemberian HGB juga tidak dapat diberikan" tegas Tigor.

Nelson Simamora dari LBH Jakarta juga menerangkan bahwa hal ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang menyatakan keberadaan tanah difungsikan untuk kepentingan sosial. Pemberian HGB semata hanya untuk kepentingan dan menguntungkan bisnis PT Kapuk Naga Indah, tidak ada kepentingan sosial atau kepentingan umum.

Pemberian HGB tidak didasarkan pada UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. "Sehingga akan berakibat kepada lingkungan ekosistem teluk Jakarta dan kehidupan nelayan" ujar juru bicara koalisi.

Koalisi meminta Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan HGB yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara dan langkah gugatan ini adalah sebagai langkah hukum agar reklamasi dihentikan. Gugatan telah diterima dengan nomor register 249/G/2017/PTUN-JKT. "Setelah ini kami menunggu jadwal persidangan" ucapnya. **(bd031)**

Ditertibkan Tanah Terlantar Seluas 23.7 ribu Ha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan penertiban terhadap Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang ada di Indonesia. Dari target 400.000 hektare (ha) tanah terlantar, Kementerian ATR telah menertibkan sekitar 23.795,45 ha. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan dari 23.795,45 ha tanah terlantar yang dibebaskan yang terbanyak berasal dari luar pulau Jawa. Seperti Sumatera, NTT ataupun kepulauan lainnya.

Ada pun TCUN seluas 23.795,445 hektare tersebut akan digunakan antara lain 1.422,24 ha untuk Reforma Agraria, 732,03 ha untuk Program Strategis Nasional dan 212,13 ha untuk cadangan negara lain. Sementara itu, 21.429,04 ha sisanya digunakan untuk mendukung bank tanah.

Menurut Sofyan, penertiban dan penatagunaan tanah terlantar tidaklah mudah karena beberapa pemilik tanah bersertifikat HGU yang tidak ingin menyerahkan kepada pemerintah. "Walaupun terlantar, orang yang punya HGU tidak pernah menyerah. Ada yang dibawa ke pengadilan tata usaha negara," ungkapnya.

Ia menambahkan Kementerian ATR juga telah melaksanakan serah terima pendayagunaan tanah terlantar untuk kepentingan umum di Kabupaten Sukabumi seluas 40 ha kepada TNI AD dan tanah terlantar di Kabupaten Semarang seluas 29,3216 ha kepada Kepolisian RI.

Sofyan mengatakan lebih lanjut bahwa tanah terlantar akan lebih bermanfaat untuk membangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. "Tanah terlantar tersebut bisa dibuat untuk fasilitas olahraga seperti lapangan sepakbola tapi bisa juga digunakan untuk fasilitas militer," kata Sofyan.

Realisasi Reforma Agraria

Sudah masuk tahun ketiga bagi pemerintahan Presiden Jokowi, janji tanah untuk rakyat melalui reforma agraria seluas 9 juta ha haruslah segera direalisasikan.

Menurut Achmad Yakub, pegiat dari Bina Desa, pemerintah harus menyegerakan redistribusi tanah untuk rakyat miskin. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa redistribusi tanah 9 juta ha.

Bersumber kawasan hutan yang akan dilepaskan sebanyak 4,1 juta ha, tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, yang berpotensi sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria sedikitnya sebanyak 1 juta ha. Terakhir adalah tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.

"Penertiban tanah terlantar atas sertifikat HGU/HGB yang dilakukan pemerintah, tujuan utamanya adalah dalam kerangka Reforma Agraria, untuk rakyat kriteria penerima Tanah Objek Reforma agraria (TORA), jadi prioritaskan dulu rakyatnya" Ujar Yakub.

Sesuai amanah TAP MPR RI No. IX/2001, Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. **(BD051TR)**



Agenda Pemerintah ur Belum Mengakomodir

Oleh : Aliza Yuliana

Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi belum memperlihatkan keseriusan dalam mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan berlapis yang dihadapi perempuan dalam pemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber agraria. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan belum mengintegrasikan prinsip keadilan gender, menempatkan perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan, termasuk perempuan kepala keluarga, bahkan tidak ada keterwakilan kepentingan perempuan dalam kelembagaan atau tim-tim yang dibentuk. Selain itu, tidak ada jaminan kesetaraan hak dalam pemilikan dan penguasaan tanah, maupun mendapatkan manfaat antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria serta TAP MPR No. IX/2001. Pelaksanaan "Reforma Agraria" versi Jokowi belum menjawab persoalan mendasar perempuan atas sumber agrariannya.

Ketidakterseriusan ini juga tercermin pada proses maupun substansi Konferensi Tenurial 2017 bertemakan "Mewujudkan Hak-hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan di Indonesia" pada 25-27 Oktober 2017 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kantor Staf Presiden tersebut. Gender hanya dijadikan jargon tanpa menjadi perspektif secara substantif. Hal itu dapat dilihat di antaranya dari: (1) Tidak adanya panel khusus yang membahas strategi dalam mengintegrasikan prinsip dan pendekatan yang berkeadilan gender dalam Reformasi Tanah dan Hutan di Indonesia, (2) Tidak ada satupun presentasi pemerintah yang mengangkat situasi dan persoalan ketimpangan mengenai gender maupun perempuan dalam kepemilikan, penguasaan,

pengelolaan dan pemanfaatan sumber agraria, (3) Minimnya pelibatan organisasi perempuan dalam kepesertaan sehingga berimplikasi pada proses, hasil dan rekomendasi konferensi ini, (4) Gender dan perempuan hanya diletakkan pada rekomendasi, bahkan prinsip keadilan gender hanya ditetapkan sebagai perhatian. Tidak ada strategi atau rencana aksi yang jelas untuk mengintegrasikan dan menerapkan prinsip keadilan gender bagi pelaksanaan kebijakan RAPS dan usaha yang berbasis tanah/hutan.

Padaahal persoalan ketimpangan struktur agraria menjadi berlapis dihadapi oleh perempuan di tengah sistem negara dan sistem sosial yang timpang dan tidak adil bagi perempuan. Perempuan masih terdiskriminasi dan termarginalisasi, khususnya dalam hal penguasaan dan kepemilikan atas tanah, kepemilikan properti dan aset-aset ekonomi, dan/atau menikmati manfaatnya serta dalam hal akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan pendapatan ekonomi.

Data BPN 2016 menunjukkan hanya 15,88% dari 44 juta bidang tanah yang teridentifikasi dimiliki oleh perempuan. Bahkan di Desa Sei Ahas Kalimantan Tengah misalnya, tidak ada surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa atas nama perempuan. Sementara di Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, perbandingan penguasaan tanah di Barati sendiri masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 90:10. Keterbatasan kontrol perempuan atas sumber daya juga berdampak pada keterbatasan akses dan kontrol perempuan atas pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya, serta meningkatkan kerentanan perempuan dari diskriminasi, kekerasan, beban berlapis dan penindasan,

Untuk Reforma Agraria Kepentingan Perempuan

baik di tingkat keluarga maupun publik.

Dalam situasi yang timpang ini, perempuan juga harus berhadapan dengan perampasan tanah dan konflik agraria yang kerap melibatkan aparat keamanan. Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan perempuan, berdampak pada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan keberlanjutan kehidupan keluarga dan komunitasnya, termasuk ketersedian pangan. Perempuan terpaksa bekerja serabutan menjadi buruh cuci, buruh tani, buruh harian lepas, berdagang, demi memenuhi ekonomi keluarga, dengan tetap mengerjakan pekerjaan domestik.

Reforma agraria seharusnya mampu menyelesaikan konflik agraria, menghapus ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, keadilan agraria bagi perempuan tidak akan terjadi tanpa upaya strategis negara yang lintas sektor dan menyeluruh, termasuk strategi dan tindakan afirmatif untuk menghilangkan hambatan-hambatan sosial dan budaya yang dialami oleh perempuan akibat ketimpangan relasi kuasa dan peran gender perempuan dalam struktur sosial.

Menurut Puspa Dewy, Ketua Solidaritas Perempuan, Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mengatasi kesenjangan dan ketimpangan gender dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, perlu ada upaya strategis negara melalui kebijakan dan rencana aksi yang mengintegrasikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme yang adil gender.

Melalui Konferensi Tenurial 2017, Solidaritas Perempuan merekomendasikan 7 point pokok agar kepada Pemerintah yaitu,

pertama menerapkan prinsip dan pendekatan yang berkeadilan gender melalui kebijakan dan rencana aksi untuk pelaksanaan Reforma Agraria, yang memastikan perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, serta memastikan keterwakilan perempuan dan kepentingan perempuan dalam kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria. Kedua, menerapkan aturan perlindungan perempuan, dengan memastikan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender, dan secara khusus dalam hal analisis resiko dan dampak, keterbukaan informasi, konsultasi dan partisipasi, persetujuan, pengajuan keluhan, serta keamanan dan keselamatan. Ketiga, Melakukan peningkatan kapasitas sosial dan tindakan afirmatif sebagai upaya menghilangkan hambatan sosial dan menciptakan kondisi pendukung bagi perempuan untuk berdaya dan aktif berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Keempat, menetapkan alokasi anggaran gender (*Gender Budget*) dalam perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria. Kelima, menerapkan analisis gender dan data terpilah gender dalam penentuan subyek dan obyek Reforma Agraria, terakhir perlunya mekanisme penyelesaian konflik yang sensitif dan responsif gender, dengan memastikan upaya pemulihan terhadap dampak materiil dan immateril yang langsung dan tidak langsung, yang dialami perempuan akibat konflik agraria, serta kriminalisasi dan kekerasan yang menyertainya.###

**Penulis adalah pegiat di Solidaritas Perempuan, dapat dihubungi melalui aliza@solidaritasperempuan.org*



Perubahan Transformatif untuk Kedaulatan Pangan

Karuna Mission Social Solidarity (Caritas Myanmar) dan Metta Foundation, dua lembaga yang berkarya di Kota Loikaw, Kayah State, Myanmar kedatangan para tamu fasilitator dari Indonesia, Cambodia, Vietnam dan Philipina dalam rangkaian *Regional Learning and Exchange Program 2nd Southeast Asia Workshop (RLEP SAW)* pada tanggal 5 – 10 November 2017 yang lalu.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pesticide Action Network Asia Pasifik (PANAP) dengan dukungan dari Misereor. Penyelenggara mengundang masyarakat sipil lima negara di Asia Tenggara untuk saling tukar cerita dan

pengalaman tentang pangan, agraria, pedesaan dan metode-metode pendekatan kepada komunitas. Secara khusus pada workshop kali ini mendialogkan tentang PAR (*Participatory Action Research*). Fasilitator dari RLEP SAW ini adalah 2 perempuan, Elisabeth “Bess” Crucada dari Philipina dan Sagari Radhika Ramdas dari India. Dan peserta yang mewakili Bina Desa ada 3 orang, Achmad Yakub, M. Chaerul Uman dan John Pluto Sinulingga.

Menurut salah satu fasilitator, Elisabeth Crucada yang biasa dipanggil Bess bahwa dalam konteks kita, komunitas harus

diberikan kesempatan dalam memimpin pengembangan kedaulatan pangan (*People Led Development for Food Sovereignty*). Kita menggunakan PAR menjadi metode pendekatan transformatif bagi masyarakat untuk meneliti lebih dalam dan menganalisis masalah yang mereka hadapi, dengan menggunakan beragam alat dan proses, diantaranya dialog dan diskusi.

Sagari Ramdas menambahkan bahwa komunitas akan menetapkan agenda mereka dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi tantangan mereka, yang mengarah pada transformasi dan perubahan. PAR adalah proses aksi-refleksi-aksi terus menerus melalui tahapan pengembangan masyarakat.

Selama enam hari workshop ini para peserta dari lima negara yang terlibat saling berbagi pengalaman dan wawasan yang diperoleh beberapa bulan terakhir dalam memfasilitasi proses belajar di masing-masing negara. Peserta juga memfasilitasi diskusi dengan komunitas di Desa War Tho Khu dan Kwaingan di Loikaw dalam sesi kunjungan komunitas selama 2 hari. Adapun tema

diskusi dengan komunitas masih berkaitan mengenai isu-isu lokal yang relevan dengan kedaulatan pangan dengan menggunakan metode PAR. Saling bertukar wawasan dan perspektif tentang penggunaan PAR.

Saling memperbarui apresiasi, mengubah kesadaran, menciptakan pengetahuan alternatif, komitmen, dan tindakan berkelanjutan, baik pada tingkat komunitas dan pada tingkat individu. Peserta juga mendiskusikan rencana garis besar untuk mengintegrasikan proses pembelajaran pengalaman, terutama tentang PAR, untuk mendorong inisiatif komunitas memimpin gerakan perubahan di komunitas mereka, lembaga dan jaringan mereka.

Kegiatan RLEP ini ditutup dengan pertunjukan budaya (*solidarity night*) dari masing-masing negara peserta yang terlibat dan bertempat di aula kantor Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) Loikaw.

Mingalar Ba (Salam khas Komunitas Myanmar), Kyei Zu Ba De Myanmar (terima kasih). **(bd030)**

Peserta dan Fasilitator RLEP (Foto : RLEP Southeast Asia Group)





Keadilan Gender Harus Jadi Bagian dari Transformasi Pedesaan

Keterangan Foto:

Pada forum ini, Dwi Astuti Ketua Pengurus Bina Desa sekaligus Ketua AsiaDhrra memberi catatan perspektif masyarakat sipil berkaitan dengan tema pembangunan pedesaan dan penghapusan kemiskinan (Foto: AsiaDhrra)

Pada 5 Oktober 2017 ASEAN menyelenggarakan ASEAN Public Private People Forum (PPP) on Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan tema Rural Transformation: Enhancing Human Capital, ASEAN bermaksud memberi ruang kepada semua pihak yg terkait RDPE untuk berdialog, berbagi pengalaman dan masukan.

AsiaDHRRA diundang mewakili organisasi non pemerintah regional ASEAN sekaligus menjadi panitia forum ini. Pertemuan dihadiri oleh wakil dari ASEAN Senior Officials Meeting on RDPE (SOM RDPE), masyarakat sipil, pemerintah, akademisi dan staf sekretariat ASEAN. Dari Indonesia hadir dari Kemenlu, Kemenko PMK, Bina Desa, Aliansi Petani Indonesia, Susilowati (Koperasi Srikandi, Purworejo), Ketut Suidiana (MBM Foundation, Bali) dan ASEAN Foundation. Susilowati dan Suidiana adalah penerima piagam penghargaan ASEAN RDPE dari Indonesia tahun ini. Panel dimulai dengan presentasi dari akademisi, menjelaskan semestinya tidak lagi mendikhotomikan desa-kota. Karena berbagai penelitian menunjukkan pada umumnya desa-desa di ASEAN saat ini sudah bertransformasi menjadi setengah kota atau kota, sehingga desa dan kota tidak dapat dipisahkan. Karenanya dua entitas itu saling mendukung sekaligus saling tarik menarik. Kemiskinan di kota semakin meningkat karena urbanisasi penduduk desa ke kota.

Pada forum ini, Dwi Astuti Ketua pengurus Bina Desa sekaligus ketua ASIADHRRA memberi catatan perspektif masyarakat sipil berkaitan dengan tema diatas. "Persoalan kemiskinan di desa adalah terbatasnya akses petani atas tanah dan pendukung pertanian lainnya, disertai kesenjangan gender yang melekat diseluruh lapisan masyarakat" Ujar Dwi Astuti. Transformasi desa harus mampu mengatasinya agar desa menjadi ruang hidup dan sumber kehidupan bagi warganya secara adil, mandiri dan berkelanjutan.

Desa yang mampu memberi kehidupan layak bagi warganya sehingga urbanisasi perempuan dan pemuda desa dapat diminimalkan. Pun demikian, desa seperti ini akan mampu membuka hubungan konstruktif dan adil dengan kota, swasta dan pihak lainnya. "Pemerintah tidak bisa menyerahkan transformasi desa kepada swasta dan pihak lain tetap aktif mengatur peran agar tidak merugikan masyarakat desa" tutup Dwi Astuti.

Wakil sektor swasta private sector, Maybank, menyampaikan programnya dalam mendukung pembangunan pedesaan di ASEAN. Program yang dilaksanakan antara lain pendidikan formal dan dukungan modal

kepada usaha kecil dalam bentuk pemberian beasiswa bagi pemuda desa, perempuan dan laki-laki, untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan dukungan modal usaha kepada pemuda desa secara perorangan seperti usaha menjahit baju, usaha kue dan lainnya. Dari program itu mampu meningkatkan penghasilan pemuda desa 100% - 300%.

Sementara dari IFAD yg berbagi info program pemberdayaan petani melalui peningkatan kapasitas organisasi tani dalam produksi dan advokasi. Ditingkat nasional memfasilitasi tumbuhnya platform bersama antar organisasi tani untuk melakukan advokasi kebijakan. Dalam soal ekonomi, IFAD memfasilitasi pengembangan koperasi tani dan memberikan perhatian pada kelompok perempuan petani.

ASEAN sekretariat menutup sesi presentasi dengan menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan mengatasi gender gap karena penelitian ASEAN menunjukkan perempuan pedesaan masih tertinggal secara sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Dengan merespon hal tersebut transformasi pedesaan akan jelas arahnya. **(bd001)**



Delegasi Indonesia hadir dari Kemenlu, Kemenko PMK, Bina Desa, Aliansi Petani Indonesia, Susilowati (Koperasi Srikandi, Purworejo), Ketut Suidiana (MBM Foundation, Bali) dan Asean Foundation. Susilowati dan Suidiana adalah penerima piagam penghargaan ASEAN RDPE dari Indonesia tahun ini.



Meneguhkan Kembali Definisi Pertanian Alami

Pada akhir September lalu di Desa Warungbanten, Lebak, Banten 22 perempuan dan 31 laki-laki yang mewakili 28 organisasi tani mandiri, pemerintah desa, individu, penggerak pertanian alami dan organisasi pendamping komunitas desa berkumpul dalam Refleksi Nasional Pertanian Alami.

Salah satu rangkaiannya adalah penandatanganan hasil diskusi tentang pedoman dan prinsip pertanian alami yang telah dirangkum dalam suatu draft definisi pertanian alami. Pedoman dan prinsip tersebut terbatas pada penerapan pertanian dengan empat aspek bahasan, yaitu (i) pengolahan tanah, (ii) penyiapan input

pertanian, (iii) produksi dan penanganan pasca panen, serta (iv) konsumsi dan distribusi.

Pada aspek pengolahan tanah, penyiapan lahan tertingginya adalah tanpa perlu olah tanah. Untuk lahan yang telah mengalami paparan pertanian kimia, proses perbaikan kualitas tanah diprioritaskan dengan bantuan alat manual (membajak dengan ternak). Untuk praktik pengolahan pada tanah luas dapat dibangun kembali budaya gotong-royong (arisan tenaga kerja, bajak kerbau bersamaan).

Dalam aspek penyiapan input pertanian



Membuat sendiri nutrisi untuk pertanian adalah hakikat dari perlawanan yang sesungguhnya
(Foto : Bina Desa)

meliputi beberapa hal, yaitu benih yang diperoleh dari proses penangkaran keluarga tani atau kelompok, proses pertukaran antar komunitas pertanian alami, serta kegiatan persilangan antar varietas lokal yang dilakukan oleh petani. Penggunaan pupuk dasarnya tidak mengandung bahan kimia sintetis, dan diutamakan menggunakan pupuk dasar berupa : kompos, mikroorganisme lokal 4 (Mikroba 4), Bokasi, dan pemanfaatan hijauan serta sisa tanaman. Mengharuskan pestisida/herbisida/fungsida yang diproduksi sendiri maupun dalam kelompok disesuaikan dengan bahan-bahan di lingkungan sekitar, dengan syarat penggunaannya hanya

diterapkan pada periode transisi dari praktik pertanian alami, selanjutnya tanah dan tanaman yang telah sehat dapat melindungi diri sendiri.

Pada aspek produksi dan pasca panen yaitu dengan menggunakan cara yang disesuaikan dengan kebiasaan lokal (pemanfaatan alat/cara manual). Aspek keempat konsumsi dan distribusi, yaitu hasil panen diprioritaskan untuk konsumsi keluarga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kelebihan/surplus hasil panen dapat didistribusikan pada saluran pemasaran yang adil dan memihak petani.

KSP Region Sulawesi

Bertani Alami, Petani Berdaulat

Oleh Wahid

Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangulara menjadi tuan rumah kegiatan refleksi pertanian alami KSP Region Sulawesi di Desa Pombewe, Kec. Biromaru, Kab. Sigi pada akhir September lalu. Dihadiri oleh 15 peserta yang berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah dan turut hadir pula Ketua BPD Desa Pombewe serta Bina Desa yang diwakili oleh John Pluto Sinulingga.

Menurut Ketua KTA (Komunitas Tani Alami Biangloe) Wahid, yang juga menjadi peserta pada kegiatan tersebut mewartakan bahwa peserta dibagi ke dalam tiga kelompok dengan tiga fokus yang berbeda, yaitu kelompok 1 fokus pada pemerintah desa, kelompok 2 fokus pada petani yang sudah melakukan pertanian alami tetapi belum berkelompok, dan kelompok 3 fokus pada masyarakat yang belum bertani alami. Setiap

kelompok terjun ke warga dan menggali informasi yang sesuai dengan kategorinya tersebut.

Ketua BPD selaku perwakilan dari pemeritahan desa memberikan respon yang positif dan memberikan dukungan untuk melakukan pengembangan pertanian alami. Secara khusus 96% masyarakat di Desa Pombewe adalah petani, 80% diantaranya petani padi dan sekitar 16% petani hortikultura.

Peserta yang telah mempraktikkan pertanian alami mengemukakan bahwa "Dengan bertani alami kita dapat menggapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Sulawesi Tengah".

Abdul Wahid salah satu pemuda tani Desa Salassae yang telah melakukan pertanian



Para peserta refleksi pertanian alami (Foto : Wahid)



Proses kelompok saat menggali informasi kepada warga di kegiatan refleksi pertanian alami Region Sulawesi. (Foto : Irma)

alami bercerita bahwa pertanian alami telah mengubah banyak hal, mulai dari perilaku, lingkungan, dan kualitas hidup yang semakin baik. "Keberhasilan tidak harus selalu dinilai dari berapa banyak jumlah dan volume yang dihasilkan, tetapi yang terpenting adalah belajar bersyukur yang ada dan tetap konsisten dengan konsep bertani alami yang kita miliki" tegasnya.

John Pluto Sinulingga mengatakan bahwa petani adalah professor, petani harus mampu merubah pola pikir pertanian dalam mengolah sawah hingga proses pemberian pupuk.

Pertanian alami adalah sistem usaha tani yang memperhatikan berbagai faktor agar kesinambungan usaha tani tersebut

dipertahankan dan tidak hanya mengutamakan hasil produksi semata. Proses produksi pertanian alami menempatkan petani sebagai pelaku utama, sehingga hasil akhir dari semua yang telah diusahakan adalah kemandirian dan kedaulatan petani atas usahanya tersebut. Pertanian alami mengajarkan kearifan dan kebijaksanaan.

Kegiatan refleksi pertanian alami ini diakhiri dengan membuat rencana tindak lanjut (RTL) untuk wilayah Sulawesi dan (RTL) setiap kabupaten/desa pada khususnya. Bertani alami, petani berdaulat! #



Jaro Ruhandi, Membuka Isolasi Desa dengan Literasi

Oleh Gina Nurohmah

Jaro Ruhandi yang akrab disapa Kang Jaro telah menjadi kepala desa sejak usianya 30 tahun pada pelantikan jabatan September 2015 silam. Arti kata Jaro ialah kepala desa, Kang Jaro menjabat kepala Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten periode 2015 – 2021.

Sosoknya dikenal penuh perjuangan. Dalam proses menempuh pendidikan, mengalami berbagai hambatan dan pertentangan dari berbagai pihak, bil khusus orang tua dan masyarakat sekitar yang sangsi akan bauh dari megeyam pendidikan. Namun, ia tetap meyakini dan mencintai pendidikan hingga kini menjadi inspirasi bagi warga desa.

Sebagai bentuk pacuan motivasi anak-anak bersekolah, membuka pikiran baru untuk bersekolah dan megeyam pendidikan. Jaro Ruhandi melakukan inovasi baru dalam mencapai visi misi desanya, salah satunya yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal : pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dalam hal pendidikan, Jaro Ruhandi menginisiasi TMB Kuli Maca yang diprakarsai bersama pemerintah desa, kasepuhan, tokoh agama, pengusaha dan para intelektual muda di Desa Warung Banten. Dalam bidang kesehatan terlibat dengan adanya posyandu, bidan desa, dan membudayakan kembali

pangan lokal. Dalam bidang kesejahteraan mengembalikan pertanian alami, membentuk kelompok pengrajin, pendirian BUMDES, dan mengembangkan peternakan. TBM Kuli Maca telah mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak, yaitu penghargaan dari Bupati Lebak atas dedikasinya sebagai pegiat kampung literasi di Kecamatan Cibeber, penghargaan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Banten.

TBM pun menjuarai Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Banten dan mewakili provinsi di tingkat nasional. Dalam tingkat nasional TBM Kuli Maca masuk dalam 5 besar dari 71.000 Perpusdes. Dalam berbagai kesempatannya, ia menegaskan bahwa gerakan literasi dalam hal ini gerakan budaya baca, bukanlah suatu program tetapi merupakan suatu kebutuhan. Berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diterima oleh TBM Kuli Maca tetap menjadikan Jaro Ruhandi sosok yang mendekati diri kepada masyarakat. Setiap minggu yang menjadi agenda bersama TBM Kuli Maca, Jaro akan menyempatkan waktu walaupun hanya 30 menit.

Baginya wajib untuk datang ke TBM baik bercerita ataupun memberikan motivasi kepada anak-anak mulai dari tingkat TK hingga mahasiswa. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk setiap hari minggu datang, membaca, bercerita. Untuk pengurus TBM diarahkan bagaimana bisa hidup mandiri tidak tergantung pada orang lain. "Jangan terus mengharapkan pemberian dari orang lain, tetapi haruslah berpikir bagaimana agar kita bisa memberi pada orang lain" itulah yang disampaikannya seringkali pada generasi muda Desa Warung Banten

Adapun hidup di tengah-tengah masyarakat adat ini, menjadikan Kang Jaro sangat kental dalam filsafah hidupnya. Pepatah luhur yang kerap disampaikan para sesepuh Kaolotan Adat Cibadak yaitu sebuah siloka yang berbunyi; "*Neangan luang ti papada urang, Neangan luang tina daluang, Neangan luang tina kalangkang, Neangan luang tina haleuang*". Jika diartikan secara bebas berbunyi, mencari

ilmu dari sesama, mencari ilmu dari membaca, mencari ilmu dari masa lalu dan padangan masa depan, serta mencari ilmu dari seni kehidupan. Dari pepatah kuno para leluhur tersebut, semangat literasi rupanya telah menjadi warisan Kaolotan Adat Cibadak sejak zaman dulu. Bagi Kang Jaro, siloka ini akan menjadi pemantik api bagi berkobarnya semangat literasi di desa dan bagi kasepuhanpun gerakan literasi sudah ada sejak zaman dahulu.

Kang Jaro secara pribadi telah mencapai beberapa prestasi yaitu kepala desa teladan tingkat nasional, juara 1 lomba desa mandiri pangan tingkat provinsi, dan penghargaan khusus Bupati untuk Kades Inovatif.

Semakin banyak pihak yang berkunjung ke Desa Warung Banten, Kang Jaro tetap konsisten bahwa dengan banyaknya dana yang masuk ke desa menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan itu tidak akan menjadi apapun jika hanya bangunan fisik semata. Ia selalu tegas menjelaskan bahwa jalan pada waktunya akan terkikis cuaca dan rusak, namun jika yang dibangun adalah mental masyarakat maka bangunan itu akan berdiri tegak selamanya. Salah satu contoh adalah dengan menyediakan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan warga dengan tujuan membiasakan diri membaca, membuka jendela dunia, dan belajar banyak dari membaca. Tekad Kang Jaro adalah membangun jiwa raga masyarakatnya dengan banyak membaca buku.

Kang Jaro selalu menginspirasi di masa kini dan di masa yang akan datang, apa yang telah digerakkannya meninggalkan jejak, apa yang telah dilakukannya diingat oleh masyarakat dan bagi generasi muda untuk terus berkarya, tetap berada dalam masyarakat, dan memegang teguh kebudayaan. Mengingatkan pada sebuah titik temu bahwa "*untuk menggapai visi masa depan, berkembanglah dimulai dari nilai-nilai luhur yang ada!*"#

Petani-Nelayan Ujung Tombak Kedaulatan Pangan

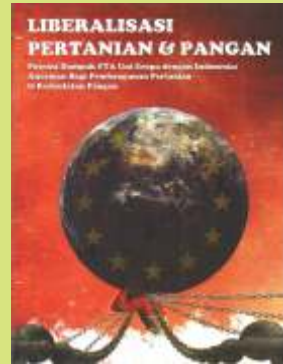
Oleh Tita Riana Zen

Judul Buku : Liberalisasi Pertanian dan Pangan

Penulis: Achmad Yakub, Elisha Kartini T. Samon, Indah Sukmaningsih dkk

Penerbit : Serikat Petani Indonesia (SPI)

Tebal: 16,5x22,5cm; viii + 92hlm.



Buku ini merupakan hasil penelitian oleh beberapa penulis, yang berlatar belakang organisasi tani, akademisi dan *non-government organization internasional*. Tentu pengalaman mereka dalam praktik kerja sama global dan berbagai kajian terkait liberalisasi pertanian dan pangan menjadi utama. Beberapa potensi dampak yang diutarakan sedikit banyak mulai terbukti. Korbannya petani dan nelayan kecil. Buku ini mengulas beberapa komoditas utama dalam skema perjanjian Indonesia-UE yaitu kelapa sawit, daging sapi, susu, serelia (biji-bijian) dan perikanan.

Sejak ditanda ditanganinya *Letter of Intent (LoI)* Indonesia dengan IMF tahun 1998-an, Indonesia semakin ramah pasar bebas. Kekinihan adalah perjanjian dagang dengan Uni Eropa (UE). Pada tahun 2006, UE datang dengan strategi perdagangan baru yang disebut Agresif Global Eropa.

Rancangan ini mendorong agar pemerintahan di Asia membuka pasar sektor swasta dan pelayanan publik termasuk kontrak pemerintah, investasi, juga deregulasi keuangan. Khusus untuk pertanian *European Commision (EC)* menyebutkan bahwa agar berhasil *Free Trade Agreement (FTA)* haruslah komprehensif dan menyentuh secara substansial serta melampaui semua prinsip-prinsip *World Trade Organisation (WTO)*.

Komisi Eropa memutuskan bahwa ini berarti penurunan bea masuk minimal 90% bagi seluruh perdagangan antar negara. Perlu

dicatat UE adalah salah satu investor terbesar di Indonesia, ada sekitar 700 perusahaan. Menarik bukan?

Jelas dan lugas paparan dari hasil studi buku ini, demikian juga cuplikan penilaian keberlanjutan dampak FTA Uni Eropa dan ASEAN yang dilakukan oleh Komisi Eropa. Jadi perlu ada alternatif bagi kita sebagai bangsa atau tetap ikut dalam skema FTA UE tersebut yang jelas dampaknya merugikan dan menjerumuskan kekubangan kesusahan dimasa depan.

Para penulis buku mengajak kita mengupas kembali semangat Konferensi Asia-Afrika 1955. Didalamnya terdapat solidaritas antar bangsa, kerjasama budaya, perdagangan dalam skema pembangunan yang pada akhirnya memerdekakan bangsa-bangsa Asia Afrika.

Demikian juga para penulis buku memberikan alat indikator dari perjanjian FTA UE-Indonesia, yaitu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan sebagai konsep dan praktik mengalami dinamika yang hebat dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Beberapa prinsipnya yaitu pangan adalah hak asasi manusia, mensyaratkan pembaruan agraria, perdagangan pangan dalam skema solidaritas dan pembangunan antar bangsa, mengakhiri kelaparan dunia, perdamaian dan solidaritas sosial serta prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Di Indonesia kita punya Pancasila. Selamat membaca.

SEREN TAUN

Bentuk Syukur dan Pengharapan

Seren taun merupakan salah satu kebudayaan sunda yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang. Seren taun berasal dari bahasa sunda, secara harfiah seren taun berasal dari kata seren yang berarti menyerahkan dan taun artinya tahun. Berdasarkan maknanya seren taun adalah proses serah terima dari panen tahun lalu untuk tahun mendatang. Dalam pandangan budaya sunda yakni sebagai bentuk pengucapan syukur kepada Tuhan YME atas hasil yang diperoleh dan juga memohon untuk panen di tahun mendatang lebih baik dari saat ini.

Beberapa wilayah yang masih melaksanakan seren taun ialah Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan, Desa adat Sindang Barang, Kabupaten Bogor, Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan salah satunya ialah seren taun Kaolotan Cibadak di Desa Warung Banten, Cibeer yang masih menggelar seren taun.

Seren taun Kaolotan Cibadak dilaksanakan pada tanggal yang disesuaikan dengan panen padi kecil. Upacara tersebut akan berlangsung selama lima hari berturut-turut.

Hari pertama yaitu *ngariung gede*, diawali dengan *seserahan ka kolot*, yaitu meminta restu kepada para sesepuh adat. Hari kedua dimulai dengan prosesi *rosul seren taun*, yaitu ritual mengirim doa untuk memohon keselamatan. Lalu, *ngarempug*, yakni permufakatan perbincangan bagaimana adat tetap dilestarikan. Hari ketiga yaitu kirim doa kepada ahli kubur, hari keempat sebagai satu hari dari puncak upacara yaitu dimulai dengan proses *ngangkat* (mengambil padi lalu memasukkannya ke dalam lesung), ada juga prosesi *laran/arak-arakan* yang dimulai pukul 8 pagi laran ka cai, pukul 11 *laran gede, baksa, kendang penca* dan dilanjut hiburan sampai pagi yaitu jaipongan, wayang golek, dan lain-lain.

Dengan setiap tahun diselenggarakan upacara adat seren taun menjadi bentuk cara bersyukur masyarakat setelah panen dan memohon panen yang akan datang lebih baik lagi serta menyambutnya dengan penuh harapan dan kegembiraan. #



Oleh: Syahrani

Membuat Tepung Sukun

Buah sukun memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Di beberapa tempat, buah ini dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Bila dibakar, tekstur daging buah sukun menjadi empuk seperti roti. Oleh karena itu orang Eropa menyebutnya sebagai buah roti. Dalam setiap 100 gram buah sukun terdapat 108 kalori, dimana didalamnya terdapat 28,2 gram karbohidrat. Ada berbagai cara agar buah sukun bisa disimpan lebih lama, yakni dengan mengubahnya menjadi pasta atau tepung.

Dalam bentuk tepung, setiap satu kilogram sukun mengandung 302 kalori dan kandungan karbohidratnya tiga kali lipat lebih tinggi dibanding dalam keadaan segar.

Tidak banyak yang menganggap tepung sukun bisa dijadikan bahan baku makanan olahan. Padahal pengolahan buah sukun menjadi tepung sukun cukup sederhana, berikut langkah-langkahnya:

- Untuk tepung sukun diperlukan buah yang memiliki tingkat kematangan kira-kira 10 hari sebelum matang sempurna. Tingkat kematangan buah mempengaruhi warna tepung, semakin tua buah semakin putih warna tepung.

- Kupas buah sukun dan potong-potong kemudian rendam dalam air begitu buah dipotong. Jangan membiarkan buah yang telah dipotong bersentuhan dengan udara terlalu lama, karena buah sukun akan mengalami pencoklatan (browning).
- Kukus buah sukun selama 10-20 menit. Pengukusan bertujuan untuk menghilangkan enzim yang membuat warna buah sukun kecoklatan. Hal ini penting agar menghasilkan tepung yang putih.
- Keringkan sukun dengan dijemur atau menggunakan mesin pengering. Pengeringan dengan sinar matahari pada cuaca cerah bisa berlangsung sekitar 2-3 hari. Pengeringan dengan mesin pengering membutuhkan waktu 5-6 jam pada suhu 55-60°C.
- Sukun siap untuk digiling menjadi tepung. Rendaman pembuatan tepung sukun sekitar 10% dari bobot basahnya.

Setelah berbentuk tepung, sukun bisa disimpan lebih lama. Ada banyak olahan makanan yang bisa dibuat dari tepung sukun. Tepung ini bisa memperkaya makanan rasa dalam makanan tersebut. Hanya saja, untuk membuat beberapa jenis kue dan bolu tetap perlu mencampurnya dengan tepung terigu.

Penulis adalah Direktur INAGRI dan redaktur ahli di alamtani.com





Dalam persiapan acara seren taun di Kaolotan Cibadak, Ibu-ibu melakukan ngangkat (mengambil padi lalu memasukkannya ke dalam lesung) dengan ketukan yang berirama dan menumbuk padinya.



Desa sebagai sumber pangan dan kaya akan segala jenis pangannya. Makan bersama dengan alas daun pisang ini dilakukan masyarakat desa sebagai penutup rembug rakyat desa dan sebagai bentuk syukur bahwa pangan kita berasal dari desa kita sendiri.



Desa Bangsal merupakan desa rawa lebak, transportasi utamanya ialah perahu untuk aktivitas masyarakat. Termasuk di dalamnya, sebagai alat untuk membawa hasil pertaniannya.



Puncak kegiatan seren taun Kaolotan Cibadak pada September 2017 silam

RUJUKAN INFORMASI PEDESAAN

www.binadesa.org



BINA DESA

PROFIL FORUM UTAMA BERITA PUBLIKASI SEKOLAH PEDESAAN

KADER TERBARU Masih Peliknya Desa dalam 3 Tahun UU Desa

JAKARTA, BINADESA.DWJ - Pimpinan organisasi Kader Desa Kajian Hari ini masih berupaya terus mempromosikan masyarakat desa sebagai subjek...

PEKERJAAN 2018
Desa dan Agribisnis Pakarangan

12 OKTOBER 2017
Undang-Undang Desa Bukan Tolak Tanggung Jawab Keluarga & Takwil Pelaksanaan UU Desa

12 OKTOBER 2017
Bertel Terus Berupaya di Desa Beraja

12 OKTOBER 2017
Sangat Penting Bicara Soal Wajar Beraja

12 OKTOBER 2017
Meningkatkan Persepsi Desa Swabina

MELAKUKAN BINA DESA
Desa dan Agribisnis Pakarangan

AGRICOLA
KEMERDEKAAN BERKUALITAS

SEKOLAH PEDESAAN

12 OKTOBER 2017
Pendidikan Musyawarah sebagai roh SEPEDA

12 OKTOBER 2017
Pendidikan Koperasi dan Kewirausahaan Sosial Bagi Petani dan Nelayan

12 OKTOBER 2017
Pembinaan Bersama : Untuk Kehidupan Keluarga Tani Yang Lebih Berkualitas

12 OKTOBER 2017
Pentingnya Kader Komunitas Swabina Pedesaan di Desa

BERTANI ALAMI

12 OKTOBER 2017
Saat Petani Bicara Soal Impor Beras

REFORMA AGRARIA

12 OKTOBER 2017
Di Tariklikan Tanah Terlantar Seluas 23,7 ribu Ha

PEKERJAAN MAHAURKA

12 OKTOBER 2017
Perempuan Desa Lubuk Aia

SWABINA

12 OKTOBER 2017
Mahasiswa UIN Jember dan Praktik NKA di Desa

12 OKTOBER 2017
Anak Muda Karir di Desa